

# MEMILIH PEMIMPIN RELIGIUS-KULTURAL MENUJU MASA DEPAN JABAR YANG AMANAH



**Gialdah Tapiansari Batubara S.H., M.H.**  
(Dosen Fakultas Hukum Unpas)

## **Pendahuluan**

Kehidupan bermasyarakat akan selalu membutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan akan sangat menentukan kondisi sosial dalam masyarakat, karena melalui pemimpin, masyarakat dan kehidupannya akan diatur, dibina, dituntun, dilayani dan dipengaruhi. Kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman, salah satunya adalah hukum.

Terkait hukum, menurut Bar-  
da Nawawi Arief sistem hukum/  
keluarga hukum yang lebih dekat  
dengan karakteristik sumber hukum  
di Indonesia, yaitu keluarga hukum  
tradisional dan hukum agama. Hal  
serupa juga pernah dikemukakan  
oleh Rene David dan John E.C.  
Brierley bahwa sistem hukum di  
Indonesia termasuk sistem gabungan  
(*mixed system*), yaitu gabungan dari

*the Romano Germanic Family/Civil  
Law System* (karena bekas jajahan  
Belanda), dengan Muslim and *Cus-  
tomary Law (Adat Law)*. Artinya jika  
sistem hukum Indonesia saja lebih  
dekat dengan karakteristik sistem  
hukum tradisional dan hukum agama,  
maka dalam memilih pemimpin  
juga harus mengacu pada kriteria  
agama (religius) dan tradisional  
(kultural). Pemimpin Religius-Kul-

tural yang penulis maksud di sini berbeda dengan tipe kepemimpinan kharismatik dan tradisional sebagaimana yang Max Weber maksudkan. Max Weber menjelaskan kepemimpinan kharismatik adalah tipe kepemimpinan yang dipilih karena kharismanya atau figurnya, sedangkan kepemimpinan tradisional merupakan tipe kepemimpinan yang pemilihannya didasarkan pada tradisi turun-temurun atau yang biasa disebut sebagai dinasti politik. Pemimpin Religius-Kultural yang penulis maksud di sini sangat berkaitan dengan ilmu.

### Pembahasan

Dalam memilih pemimpin, ilmu sering dijadikan sebagai salah satu kriteria memilih pemimpin. Menempatkan ilmu sebagai indikator utama memang merupakan strategi cerdas. Betapa tidak karena dalam Al-Qur'an dan beberapa Hadist juga telah dikemukakan terkait keutamaan dari ilmu. *Pertama*, surat An-Nisaa 162: yang intinya menyatakan bahwa orang-orang yang mendapat pahala besar ialah : (1) orang yang mendalami Ilmu-nya; (2) Orang yang beriman kepada Allah; (3) Orang yang mendirikan salat; (4) orang yang menunaikan zakat; (5) Beriman kepada Allah dan hari Akhir.

*Kedua* Hadist Nabi yang menyatakan bahwa: *man arodad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirota fa alaihi bil ilmi faman aroda humaa fa alaihi bil ilmi* (barangsiapa meng-

hendaki kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu, dan barangsiapa menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu, maka barangsiapa menghendaki kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu). *Ketiga*, HR Bazzar menyatakan bahwa: Keutamaan ilmu adalah lebih baik daripada keutamaan ibadah. *Keempat*, HR Dai-lami menyatakan bahwa: Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalan, dan jalan ke surga adalah ilmu. Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa "produk apa pun akan hancur/rusak, apabila digunakan tidak dengan ilmunya".

Berilmu seharusnya tidak dimaknai semata-mata sebagai memiliki kecerdasan intelektual, sehingga seseorang yang berilmu sering disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan yang lebih fokus pada logika nalar, bersifat rasional, sederhana, datar, matematis dan formal. Hal ini wajar mengingat ilmu-ilmu modern memang berkembang dengan mengedepankan logika. Kecerdasan intelektual menurut Satjipto Rahardjo memang akurat, tetapi amat terikat patokan (*rule-bound*) dan sangat melekat pada program yang telah dibuat (*fixed program*) sehingga menjadi deterministik. Pada kecerdasan intelektual, berpikir menjadi suatu *finite game*, dan terlalu mengandalkan kecerdasan intelektual sangat cenderung membuat arogan dan cepat berpuas diri dengan kemajuan yang dicapai.

Berilmu seyogyanya juga harus dimaknai sebagai memiliki kecer-

dasan emosional dan spiritual (penulis menyebutnya sebagai religius), sehingga seseorang yang berilmu seharusnya disebut sebagai seseorang yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan religius. Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang sedikit lebih maju dari kecerdasan intelektual, karena tidak semata-mata menggunakan logika tetapi bersifat kontekstual atau dalam konteks. Kecerdasan ini penting, mengingat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan diperlukan adanya empati, komitmen dan dedikasi. Kecerdasan religius sebagai kecerdasan berikutnya, merupakan kecerdasan manusia yang tertinggi. Kecerdasan religius merupakan kecerdasan yang tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada/melampaui dan menembus situasi yang ada (*transenden*) dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian pada kecerdasan ini berpikir menjadi suatu *infinite game*. Kecerdasan religius tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif (mematahkan patokan yang ada sekaligus membentuk yang baru) dan membebaskan. Kecerdasan religius sama sekali tidak menyingkirkan kecerdasan intelektual dan emosional, tetapi meningkatkan kualitas kecerdasan intelektual dan emosional sehingga mencapai tingkat yang oleh Zohar dan Marshall disebut "kecerdasan sempurna" (*ultimate intelligence*).

Kecerdasan religius merupakan kecerdasan yang menggugah rasa moral, dengan memberikan suatu kemampuan untuk mengendalikan sebuah kekakuan melalui pengertian (*understanding*) dan rasa keterlibatan. Penggunaan kecerdasan religius untuk menjalankan kepemimpinan, memberi pesan penting untuk berani mencari jalan baru dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan kepemimpinan yang lama dan tradisional (yaitu yang masih mengandalkan kecerdasan intelektual dan emosional) yang lebih banyak melukai rasa keadilan masyarakat. Kepemimpinan yang menggunakan kecerdasan religius selalu mendorong pemimpin untuk bertanya kepada nurani tentang makna kepemimpinan yang dijalankan.

Menurut penulis, memiliki kecerdasan religius merupakan kriteria utama dalam memilih pemimpin. Karakteristik religius dipilih karena merupakan amanat dan sekaligus tuntutan sebagaimana termaktub dalam konstitusi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Rambu nasional dalam konstitusi tersebut jelas menuntut adanya penggunaan "nilai religius", sebagai karakteristik ke-Indonesiaan dalam menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk dalam memilih pemimpin. Dari rambu di atas jelas terlihat, bahwa seharusnya tidak ada "sekularisme" dalam hal apa pun termasuk dalam konteks memilih pemimpin.

Pentingnya aspek religius juga pernah dikemukakan oleh Moeljatno dan Albert Einstein bahwa, "dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan adalah tidak lengkap", dan "*science without religion is lame* (ilmu tanpa agama adalah lumpuh). Ungkapan di atas tentunya dapat juga diterapkan dalam menetapkan kriteria utama memilih pemimpin Jabar dalam rangka mewujudkan pemimpin yang amanah. Karena tanpa nilai religius sebuah kepemimpinan yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi tidak lengkap, timpang bahkan berbahaya.

Pemimpin religius adalah pemimpin yang percaya bahwa dirinya adalah manusia yang beriman sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Pemimpin yang menempatkan keteguhan dalam keimanan sebagai garda pertama dalam *motto* kepemimpinannya, dilandasi oleh keyakinan bahwa sesungguhnya ia adalah insan yang menyadari bahwa dirinya bukan saja perlu menjalin hubungan horisontal dengan sesamanya melainkan juga dituntut untuk senantiasa melakukan hubungan vertikal dengan Pencipta alam semesta, karena pemimpin mempunyai tanggungjawab yang tidak saja tanggungjawab secara fisik tetapi juga tanggung jawab religius terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin.

Memilih pemimpin dan menjadikan kecerdasan religius sebagai garda pertama tentunya dengan pertimbangan bahwa, *Pertama*: karena baik, bermoral, jujur dan amanah tidaklah dapat diukur atau ditempuh melalui karakteristik kepemimpinan yang sempit, yakni kepemimpinan yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, melainkan harus diimbangi dengan karakteristik memiliki kemampuan atau kecerdasan religius. Kecerdasan religius merupakan "rumah" yang nyaman bagi kejujuran dan kebenaran. Kecerdasan religius meliputi juga di dalamnya kecerdasan emosional. *Kedua*: karena tipe kepemimpinan yang mengandalkan intelektualitas semata merupakan tipe kepemimpinan rasional absah yang perolehan wewenangnya berdasar pada legalitas atau kesahan peraturan semata dengan struktur birokrasi semata dan tidak mudah berbaur dengan masyarakat secara langsung. Tipe kepemimpinan seperti ini merupakan tipe yang dominan saat ini, sekaligus sebagai salah satu pencetus berbagai persoalan hukum yang terjadi saat ini.

Selain kecerdasan religius masih terdapat kecerdasan keempat yaitu kecerdasan kultural. Kecerdasan ini penting mengingat sejak dilahirkan di dunia manusia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dimana kesatuan manusia tadi memiliki kultur. Pemimpin yang memiliki kecerdasan kultural merupakan tipe kepemimpinan yang berlandaskan pada kearifan lokal yang dianut oleh sebuah

komunitas, merakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan, mementingkan moralitas, mengedepankan kepentingan masyarakat dengan nilai toleransi yang tinggi, rela mengorbankan harta bahkan jiwa raga untuk kepentingan masyarakat dan mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat.

Pemimpin kultural merupakan pemimpin yang selalu mendorong penguatan karakter masyarakat sesuai dengan kepribadian kultur bangsa (berkesadaran etis, cakap, kreatif, inovatif, mandiri), mampu memberdayakan masyarakat sebagai subjek atau produsen kebudayaan (menciptakan peluang budaya, sosial, ekonomi dan politik untuk mengembangkan potensi, martabat serta kesejahteraan masyarakat), menciptakan infrastruktur sosial dan budaya yang menjawab kebutuhan perkembangan masyarakat, mendistribusikan kekuasaan secara adil kepada masyarakat (disini masyarakat diposisikan sebagai subjek dan selalu didengar, dilibatkan dalam pembangunan sehingga turut menikmati hasil-hasilnya baik secara material maupun imaterial.

Pemimpin kultural adalah pemimpin yang senantiasa menularkan kultur positif yaitu pemimpin masa depan yang senantiasa membina, bukan menghina. Mendidik, bukan membidik. Mengobati, bukan melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Mengajak, bukan mengejek. Menyejukan, bukan memojokan. Menasehati, bukan mencaci maki. Merangkul, bukan memukul. Argu-

mentatif, bukan provokatif. Bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Realistis, bukan fantastis. Mencerdaskan bukan membodohan. Menawarkan solusi, bukan mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba menjatuhkan. Mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari-cari aib dan menyebarkannya. Menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan. Memberi senyum manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih menanggung problema umat, bukan meletihkan umat. Menyatakan kekuatan, bukan memecah belah. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Mencari teman, bukan mencari lawan. Melawan kesesatan, bukan mengotak atik kebenaran. Memupuk kebersamaan, bukan berbangga dengan kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mencinta, bukan membenci masyarakat. Mendatangi, bukan menggonggong dipanggil dan memaafkan, bukan menyalahkan.

Pemimpin kultural bukan pemimpin yang bermental tahu, bukan pemimpin kemarin sore, dan bukan pemimpin instan. Pemimpin kultural adalah pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakatnya dan menurut penulis, apa yang diinginkan masyarakat Jabar saat ini adalah karakteristik pemimpin

sebagaimana telah dikemukakan di atas. Melalui karakteristik pemimpin kultural, Jabar akan menjadi Jabar besar yang berbudaya, bermartabat, berperadaban tinggi, maju, makmur, modern, tidak semata-mata mengejar kepentingan ekonomi dengan menjadikan daerahnya tidak ubahnya pasar bebas yang hanya menguntungkan para penguasa modal besar, karena Ekonomi memang sangat penting tetapi ekonomi tetap harus selalu diselaraskan atau berbasis pada nilai-nilai kultur sehingga memiliki kepribadian budaya.

## Penutup

Pemimpin Jabar yang Religius-Kultural akan mewujudkan demokrasi yang bermartabat yaitu demokrasi yang memosisikan masyarakat Jabar sebagai pemilik sah kedaulatan. Kekuasaan yang dilahirkan melalui demokrasi ini akan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jabar, bukan kepentingan golongan, kelompok elite kekuasaan maupun elite ekonomi (penguasa modal). Pemimpin Jabar sebagai regulator, fasilitator sekaligus administrator adalah pelayan masyarakat Jabar, bukan pelayan penguasa modal, patuh menjalankan konstitusi, mampu menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai dasar negara dan amanah konstitusi. Karakteristik pemimpin yang diutarakan di atas, Insya Allah merupakan karakteristik pemimpin yang ada dalam jaminan Allah Subhana Wata'ala yang akan membuat kehidupan masyarakat Jabar di bawah kepemi-

mpinan pemimpin yang demikian menjadi bermartabat, berakhlak, tenang, nyaman, tentram, dan amanah. Aamiin.

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pinana) Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*. Semarang, 2007.
- Gialdah Tapiansari Batubara. 2017. *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung Edisi No.155/Februari 2017.
- Gus Taqi, Hidup Positif, 28 September 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=vztcAYqe1NE>
- Indra Tranggono, *Pelaku Budaya*, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 17 Februari 2017.
- Ketua Bid PIPW Lembaga Kajian Ilmiah Mahasiswa Bertakwa Universitas Negeri Makassar, *Kepemimpinan Kultural, Solusi Kebuntuan*, 10 Oktober 2017, <http://lkimbunm.id/lkimb/gaya-kepemimpinan-kultural-solusi-kebuntuan/>
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2008.